

Editor:  
Prof. Muhammad Zilal Hamzah, PhD

pi

Fenomena  
**Daya Saing**  
*Indonesia*  
**di Era Global**



Venti Eka Satya, Edmira Rivani, Rasbin,  
Ari Mulianta Ginting, Dewi Restu Mangeswuri

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Editor

**Prof. Muhammad Zilal Hamzah, PhD**

# **FENOMENA DAYA SAING INDONESIA DI ERA GLOBAL**

Venti Eka Satya

Edmira Rivani

Rasbin

Ari Mulianta Ginting

Dewi Restu Mangeswuri

Publica Indonesia Utama

2022

\*\*\*

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

Fenomena Daya Saing Indonesia di Era Global / Ari Mulianta Ginting, Venti Eka Satya, Edmira Rivani, Rasbin, Dewi Restu Mangeswuri| Ed. 1; Cet. 1.-Jakarta: Publica Indonesia Utama - 2022

viii + 115 Hlm; 14,8 X 21 cm

ISBN: 978-623-8232-00-0

Cetakan Pertama, Desember 2022

Judul:

Fenomena Daya Saing Indonesia di Era Global

Penulis : Venti Eka Satya, Edmira Rivani, Rasbin, Ari Mulianta Ginting,  
Dewi Restu Mangeswuri

Editor : Prof. Muhammad Zilal Hamzah, PhD

Penata halaman : Tim Kreatif Publica Institute

Desain Cover : Tim Kreatif Publica Institute

copyrights © 2022

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022  
18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar  
Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta  
publicaindonesiautama@gmail.com

## KATA PENGANTAR

Daya saing merupakan salah satu unsur terpenting dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Semakin tinggi daya saing suatu negara maka berdampak terhadap peningkatan perekonomian negara tersebut. *World Economic Forum* (WEF) menempatkan Indonesia pada urutan ke-72. Perbaikan daya saing menjadi hal yang penting dan menjadi fokus utama dari pemerintahan era Presiden Joko Widodo, hal ini dapat terlihat dari berbagai pembangunan infrastruktur yang dibangun untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

Buku bunga rampai “Fenomena Daya Saing Indonesia di Era Global” merupakan hasil pemikiran para Analis Legislatif di Pusat Penelitian Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Buku ini sangat relevan terkait kondisi daya saing Indonesia yang sedang mencoba memperbaiki daya saing Indonesia. Buku bunga rampai ini menampilkan lima artikel yang membahas berbagai isu beragam terkait fenomena daya saing dan bagaimana Indonesia mencoba meningkatkan daya saing baik dari sisi pemerintah daerah, infrastruktur, ekspor, tenaga kerja, kebijakan anggaran untuk meningkatkan daya saing dan kondisi empiris dari daya saing di salah satu kabupaten di Indonesia.

Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para penulis, Ari Muliarta Ginting, Venti Eka Satya, Edmira Rivani, Rasbin dan Dewi Restu Mangeswuri yang telah menghadirkan beragam tulisan berkualitas dalam buku ini. Tak Lupa, Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada editor, Prof. Muhammad Zilal Hamzah, Ph.D. yang telah mencurahkan pikiran dan waktunya untuk memberikan masukan yang berharga terhadap penyelesaian buku ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada segenap pihak yang ikut berkontribusi sehingga terwujudnya buku ini.

Harapannya, sumbangan pemikiran para penulis dalam buku ini dapat memberikan manfaat dalam membantu tugas-tugas kedewanan terkait kondisi daya saing Indonesia. Selain itu, buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keahlian pihak-pihak yang membutuhkan baik lingkungan Analis Legislatif, DPR RI, maupun masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Jakarta, November 2022

Achmad Sani Alhusain, SE., MA.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	iii
Halaman Balik Sampul .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	vii
Prolog .....	ix

### **Bagian I**

Kebijakan Anggaran Infrastruktur untuk Peningkatan Daya Saing Nasional.....	1
<i>Venti Eka Satya</i>	
Indikator Daya Saing Menurut Lembaga Pemeringkat	
Daya Saing Dunia.....	6
Kebijakan Anggaran Infrastruktur Indonesia.....	12
Daftar Pustaka .....	20

### **Bagian II**

Peningkatan Produktivitas dalam Upaya Membangun Daya Saing Tenaga Kerja di Indonesia .....	23
<i>Edmira Rivani</i>	
Pendahuluan .....	23
Konsep Daya Saing Daerah .....	25
Karakteristik Pendidikan dan Keterampilan Tenaga Kerja ...	31
Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) ...	35
Penutup.....	39
Daftar Pustaka .....	40

### **Bagian III**

Daya Saing Ekspor Indonesia sebelum dan Saat Pandemi Covid-19: Menggunakan Pendekatan <i>Revealed Comparative Advatage</i> .....	43
<i>Rasbin</i>	

Pendahuluan .....	43
<i>Revealed Comparative Advantage</i> .....	45
Perkembangan Neraca Perdagangan, Ekspor dan Impor .....	48
Daya Saing Ekspor .....	51
Kesimpulan .....	62
Daftar Pustaka .....	63

#### **Bagian IV**

Peran APBDN dalam Peningkatan Daya Saing Daerah: Studi di Kabupaten Purwakarta .....	65
-----------------------------------------------------------------------------------------	----

*Ari Mulianta Ginting*

Pendahuluan .....	65
Identifikasi dan Pengembangan Potensi Kabupaten Purwakarta untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah.....	69
Peran APBD dalam Mendorong Peningkatan Daya Saing Pemerintah Kabupaten Purwakarta .....	73
Penutup.....	80
Daftar Pustaka .....	81

#### **Bagian V**

Strategi Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing di Kabupaten Purwakarta .....	83
----------------------------------------------------------------------------------------------	----

*Dewi Restu Mangeswuri*

Pendahuluan .....	83
Gambaran Kondisi Perekonomian Kabupaten Purwakarta .....	85
Potensi Daya Saing Daerah .....	91
Strategi Peningkatan Perekonomian Daerah .....	95
Kesimpulan .....	97
Daftar Pustaka .....	100

Epilog.....	103
-------------	-----

Indeks .....	109
--------------	-----

Biografi Editor .....	112
-----------------------	-----

Biografi Penulis.....	114
-----------------------	-----

\*\*\*

## PROLOG

World Economic Forum (WEF) dalam Global Competitiveness Index (GCI) 2019, menyebutkan bahwa daya saing global Indonesia dengan capaian skor 64,6, berada pada peringkat 50 dari 141 negara. Di Kawasan Asia Tenggara (ASEAN), Indonesia berada pada urutan ke-4 setelah negara Singapura, Malaysia, dan Thailand. WEF mendefinisikan daya saing nasional sebagai seperangkat institusi, kebijakan, dan faktor yang menentukan tingkat produktivitas suatu negara. Selanjutnya, WEF telah memperkenalkan Global Competitiveness Index 4.0 (GCI 4.0) pada tahun 2018 yang lalu. GCI 4.0 ini terdiri dari 12 pilar produktivitas utama yang dikelompokkan ke dalam empat faktor pendorong perkembangan pada era industri 4.0 yaitu: *human capital, agility, resilience* dan *innovation*.

Sejalan dengan hal tersebut, Institute for Management Development (IMD) yang berkedudukan di Swiss, dalam World Competitiveness Yearbook 2022 menyajikan peringkat daya saing perekonomian dari 63 negara yang di survei. Perekonomian diurutkan dari yang paling besar sampai yang paling rendah tingkat kompetitifnya. Skor ditunjukkan dalam bentuk indeks (0 hingga 100). IMD menganalisis kapasitas negara dalam menciptakan dan memelihara lingkungan yang mendukung daya saing bisnis atau perusahaan. Asumsinya adalah penciptaan kekayaan terjadi terutama di level perusahaan (baik swasta atau milik negara), sehingga survei ini disebut “daya saing perusahaan”. Selanjutnya, karena perusahaan beroperasi di lingkungan nasional dan atau internasional, maka selanjutnya “daya saing negara” yang tercakup dalam Peringkat Daya Saing Dunia Global.

Hasil survei tersebut menunjukkan peringkat 5 negara tertinggi yaitu: Denmark, Switzerland, Singapore, Sweden, dan Hong Kong. Denmark telah mengambil alih Swiss sebagai ekonomi paling kompetitif di dunia. Denmark naik dari peringkat ke-3 tahun lalu dan menjadi peringkat teratas di tahun 2022 ini untuk pertama kalinya dalam 34 tahun. Sementara itu, Indonesia berada pada peringkat ke-44.

IMD menyatakan bahwa salah satu daya saing yang perlu diperhatikan adalah daya saing tenaga kerja. Sebagaimana diketahui bahwa tenaga kerja memiliki peran penting dalam proses pembangunan ekonomi. Bersama-sama dengan infrastruktur dan kemampuan tata kelola, tenaga kerja menjadi faktor kunci yang dapat mendorong dan mempercepat naik dan turunnya daya saing suatu perekonomian. Studi empiris menunjukkan terdapat korelasi yang cukup kuat antara daya saing tenaga kerja dengan daya saing perekonomian. Semakin tinggi daya saing tenaga kerja di suatu negara, semakin tinggi juga daya saing perekonomian negara itu, atau sebaliknya.

Secara konseptual, peningkatan daya saing tenaga kerja sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia (SDM). Tidak mengherankan jika sejumlah negara pada survei IMD, seperti China (peringkat ke-17) dan Korea Selatan (peringkat ke-27), melihat pentingnya daya saing tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi sehingga menempatkan pembangunan SDM (human resource development) sebagai agenda utama pembangunan. Pada tataran perencanaan maupun pada tahapan pelaksanaan, agenda pembangunan SDM di negara tersebut, secara konsisten selalu mendapat prioritas dan dukungan; baik dari sisi finansial maupun dukungan politis melalui berbagai kebijakan. Oleh karena itu, meskipun upaya pembangunan SDM sebenarnya cenderung kompleks dengan mekanisme yang ketat dan proses yang cukup panjang, tetapi konsistensi politis dan dukungan

anggaran membuat China ataupun Korea Selatan berhasil membangun tenaga kerja dengan daya saing yang tinggi.

Sementara itu, dalam konteks daya saing infrastruktur, WEF menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan ke-72 dan Singapura (misalnya) tetap berada di peringkat pertama sebagai negara dengan daya saing infrastruktur tertinggi di dunia dan di ASEAN dengan skor 95,1. Laporan ini menunjukkan bahwa peringkat daya saing infrastruktur Indonesia juga masih tertinggal di kawasan ASEAN. Berbagai perbaikan yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur masih belum mampu meningkatkan peringkat daya saing Indonesia.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp392 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Anggaran tersebut meningkat sebesar 7,8% dari tahun 2018 (Rp363,8 triliun). Sebagian besar belanja ini akan disalurkan melalui belanja pemerintah pusat dan sisanya disalurkan melalui tunjangan kinerja daerah (TKD). Dengan anggaran tersebut, pemerintah berencana untuk membangun berbagai layanan dasar, termasuk 3.511 rumah susun dan pembangunan, rehabilitasi atau renovasi sarana dan prasarana 670 sekolah dasar dan menengah. Berdasarkan 4 (empat) faktor daya saing yang senantiasa disurvei yakni: *Economic Performance*, *Government Efficiency*, *Business Efficiency* dan *Infrastructure*, maka peringkat bidang *infrastructure* Indonesia adalah yang terendah dibandingkan peringkat tiga bidang lainnya.

Sebagaimana diketahui, infrastruktur yang baik akan mengurangi biaya tetap dan biaya variabel dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu infrastruktur berperan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta pelayanan bagi masyarakat luas. Ketersediaan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, bandara, sistem penyediaan tenaga listrik, irigasi, sistem penyediaan air bersih, sanitasi, dan sebagainya, memiliki

keterkaitan yang sangat kuat dengan tingkat perkembangan wilayah, yang antara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Munculnya wabah pandemic Covid-19, tidak hanya mempengaruhi sektor kesehatan, tapi juga sektor ekonomi. World Economic Outlook (WEO) dari International Monetary Fund (IMF) menunjukkan bahwa ekonomi dunia disaat pandemi Covid-19 tahun 2020 mengalami perlambatan sebesar -3,1% (*year-on-year/yoy*). Volume perdagangan dunia juga mengalami perlambatan sebesar -7,9% (*yoy*). Kondisi ini disebabkan oleh kebijakan *lockdown*; baik penuh ataupun sebagian yang diterapkan oleh negara-negara di dunia. Indonesia juga mengalami dampak negatif dari pandemi Covid-19. Saat awal terjadinya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat sebesar -2,1% (*yoy*). Kondisi ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yang mencapai 5,02% (*yoy*). Namun, seiring kebijakan yang diambil oleh pemerintah; baik di sektor kesehatan maupun di sektor ekonomi, perekonomian Indonesia tetap mengalami perbaikan. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai angka 3,7% (*yoy*).

Disisi lain, penerapan Kebijakan Otonomi daerah yang telah dilaksanakan selama ini, khususnya dalam sisi fiskal, menjadi penting dan vital dalam peningkatan daya saing khususnya daya saing pemerintah daerah. Pemerintah Daerah menjadi sangat mengetahui apa dan bagaimana daerahnya, sehingga dapat menyusun rancangan kegiatan pembangunan daerahnya dengan baik. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah ini, maka pemerintah daerah harus mengarahkan pembangunan kepada inovasi yang lebih terarah dan berdaya saing sehingga hasilnya dapat digunakan untuk kemajuan pembangunan daerah. Sebagaimana yang

telah dijelaskan sebelumnya, tingkat daya saing (sekali lagi) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan negara dan daerah.

Kemenristek/BRIN (2021), menyatakan bahwa pada tahun 2020, terdapat lebih-kurang 20% dari seluruh pemerintah kabupaten/kota yang memiliki indeks daya saing yang tinggi. 80% sisanya memiliki indeks daya saing yang masih relatif rendah dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut untuk meningkatkan kapasitas dan memperbaiki daya saingnya. Salah satu kabupaten kota yang memiliki daya saing kategori tinggi adalah Kabupaten Purwakarta di Provinsi Jawa Barat.

Indikator tingginya daya saing Kabupaten Purwakarta adalah dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta. Disamping memiliki Danau Jatiluhur sebagai salah satu pusat pembangkit listrik yang memasok kebutuhan listrik untuk daerah Jawa-Bali, Kabupaten Purwakarta juga mempunyai lahan pertanian dan perkebunan, serta dikenal juga sebagai pemasok barang kebutuhan pokok, dan lain sebagainya. Hal-hal inilah yang meningkatkan skala ekonomi Kabupaten tersebut. Disamping itu, kedekatan dengan pusat-pusat permintaan seperti Jakarta dan Bandung menjadi keunggulan lain yang dimiliki oleh Kabupaten ini. Disisi lain, sektor finansial juga berkembang pesat di Purwakarta dan ini juga dapat menjadi pendukung peningkatan produktivitas ekonomi. Dengan berbagai ragam keunggulan ini, tidak salah Kabupaten ini menjadi salah satu kabupaten dengan daya saing tinggi di Indonesia. Ini harus dicontoh oleh Kabupaten/Kota yang lain. Meskipun tidak sama potensinya, maka bisa diolah potensi yang lain yang ada di daerah-daerah tersebut.

Secara terinci dan jelas, uraian diatas tersaji secara menyeluruh di dalam buku yang berjudul **“Fenomena Daya**

**Saing Indonesia di Era Global**". Buku ini tersusun atas 5 (lima) bagian yang tak terpisahkan, dengan bagian pertama berjudul "Kebijakan Anggaran Infrastruktur Untuk Peningkatan Daya Saing Nasional" yang ditulis oleh Venti Eka Satya. Bagian kedua dari buku ini berjudul "Peningkatan Produktivitas Dalam Upaya Membangun Daya Saing Tenaga Kerja di Indonesia", yang ditulis oleh Edmira Rivani. Bagian ketiga dari buku berjudul "Daya Saing Ekspor Indonesia Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19: Menggunakan Pendekatan Revealed Comparative Advantage", yang ditulis oleh Rasbin. Bagian keempat buku ini berjudul "Peran APBD Dalam Peningkatan Daya Saing Daerah: Studi di Kabupaten Purwakarta", yang ditulis oleh Ari Mulianta Ginting. Bagian penutup dari buku ini berjudul "Strategi Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing di Kabupaten Purwakarta", yang ditulis oleh Dewi Restu Mangeswuri.

Editor

## EPILOG

Prof. Muhammad Zilal Hamzah, Ph.D

Pada tahun 1987, beberapa ilmuwan sosial di U.S. Army War College memperkenalkan konsep VUCA untuk menggambarkan situasi tidak menguntungkan setelah Perang Dingin. VUCA adalah singkatan dari *volatility*, *uncertainty*, *complexity*, dan *ambiguity*. Di era *Industry 4.0* dan era *Society 5.0*, konsep ini masih relevan. Dunia dihadapkan pada kondisi dimana sering terjadi perubahan (*volatility*), ketidakpastian dalam melakukan prediksi secara akurat (*uncertainty*), kerumitan akibat berbagai faktor yang saling terkait (*complexity*), dan ketidakjelasan (*ambiguity*). Dalam 2 tahun terakhir, kondisi VUCA semakin diperparah dengan adanya pandemic Covid-19.

Jamais Cascio (2020) seorang antropolog Amerika menganggap bahwa VUCA tidak lagi menggambarkan situasi saat ini. Kondisi saat ini lebih tepat apabila disebut dengan BANI. BANI adalah singkatan dari *Brittle* (mudah pecah), *Anxiety* (keadaan yang mengkhawatirkan), *Non-linear* (tidak lurus), dan *Incomprehensible* (sulit dipahami). Banyak negara yang mengalami kesulitan dalam penyediaan kebutuhan dasar warganya dan banyak perusahaan dunia yang menjadi bangkrut akibat pandemi Covid-19. Menghadapi era BANI ini, pemerintah, perusahaan, maupun manusia secara personal dituntut untuk mempunyai kapasitas daya adaptasi, mempunyai rasa empati terhadap sesama, memahami keterkaitan antar permasalahan yang ada, dan menerima perbedaan pendapat serta bergerak kearah peningkatan untuk segala keunggulan yang dimiliki.

Disisi lain, sesuai dengan kerangka yang dibuat oleh IMD, faktor-faktor yang berperan dalam Konsep Daya Saing adalah sebagai berikut:

KINERJA PEREKONOMIAN	PEMERINTAHAN YANG EFISIEN	EFISIENSI USAHA	INFRA-STRUKTUR
Ekonomi Nasional	Keuangan Negara	Produktivitas	Infrastruktur Dasar
Perdagangan Internasional	Kebijakan Fiskal	Pasar Tenaga Kerja	Infrastruktur Teknologi
Investasi Asing	Kerangka Institusional	Keuangan	Infrastruktur Ilmiah,
Tenaga Kerja	Legislasi Usaha	Praktek Manajemen	Kesehatan dan Lingkungan
Harga	Kerangka Sosial	Penghargaan dan Nilai	Pendidikan

Dari tabel terlihat bahwa, karena kinerja perekonomian terdiri dari aktivitas-aktivitas Ekonomi Nasional, Perdagangan Internasional, Investasi Asing, Tenaga Kerja, dan Harga, maka Pemerintah harus mampu meningkatkan sinkronisasi dalam kerangka kinerja perekonomian ini. Misalnya kebijakan perdagangan internasional, tentu apa yang akan dibuat haruslah cerminan lingkup internasional. Ada masalah-masalah seperti batasan perdagangan (seperti: tarif, kuota dan sebagainya) yang harus dipatuhi. Sasaran kebijakan perdagangan internasional juga mesti diarahkan untuk mempertahankan daya saing produk Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif dan transfer teknologi (apabila kita belum mempunyai teknologinya). Tenaga kerja Indonesia harus disiapkan untuk *go international*, sebab telah dibukanya kebijakan *borderless country yang mengakibatkan* bebasnya aliran tenaga kerja antar negara.

Dalam hal Pemerintahan yang Efisien, yang terdiri dari aktivitas-aktivitas Keuangan Negara, Kebijakan Fiskal, Kerangka Institusional, Legislasi Usaha, dan Kerangka Sosial, maka hal-

hal seperti perundangan, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan pimpinan-pimpinan perusahaan, harus dibuat dengan cermat. Khusus kepada Kebijakan, hal ini harus dibuat dengan seksama dan memperhatikan payung hukum yang melandasinya. Hal-hal konkrit lain misalnya adalah menciptakan stabilisasi nilai tukar, menurunkan inefisiensi di berbagai bidang, serta menjaga kondisi sosial yang baik dilingkungan masyarakat.

Dalam hal Efisiensi di Bidang usaha, yang terdiri dari aktivitas-aktivitas Produktivitas, Pasar Tenaga Kerja, Keuangan, Tata Kelola Manajemen, dan Penghargaan dan Nilai, maka pemerintah harus menciptakan peraturan dan kebijakan yang terukur pada praktek-praktek bisnis yang baik dan sesuai aturan. Efisiensi pada setiap level kegiatan perlu terus diupayakan agar produk barang dan jasa Indonesia tidak terhambat oleh berbagai aturan yang disepakati di tingkat global. Merupakan bagian dari tataran ini adalah penerapan Good Corporate Governance (GCG), pemberantasan praktek bisnis yang menyimpang, seperti korupsi, pungutan, dan sebagainya, yang menyebabkan terciptanya ekonomi berbiaya tinggi.

Dalam aspek Infratraktur yang terdiri dari aktivitas-aktivitas Infratraktur Dasar, Infratraktur Teknologi, Infratraktur Ilmiah, Kesehatan dan Lingkungan, Pendidikan, maka pemerintah harus membangun infratraktur yang siap pakai dan berdayaguna tinggi seperti: Pelabuhan udara, laut dan fasilitas jalan raya. Secara keseluruhan, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan seringkali mengakibatkan mundurnya pengambilan keputusan. Proyek infratraktur sering terkendala. Masalah pengadaan lahan adalah diantara aktivitas yang berakibat pada tertundanya pencapaian maksimal. Masalah pendanaan juga sering muncul akibat tidak tersedianya dukungan fiskal dari Pemerintah. Ketidaksiesuaian atau ketidaksepakatan atas pembagian risiko antara pemerintah

dan badan usaha sering terjadi. Tidak ketinggalan, tentunya infrastruktur Pendidikan bagi calon-calon tenaga kerja, yang baik dan berorientasi internasional. Peningkatan daya saing tenaga kerja merupakan akumulasi dari proses panjang pembangunan SDM yang terstruktur dan sistematis. Kita menyadari bahwa pembangunan SDM di Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan serius.

Berdasarkan hal-hal diatas, Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global, tentunya sudah harus mempunyai posisi tawar yang tinggi. Posisi tawar yang tinggi ini tentunya akan diperoleh dengan peningkatan daya saing yang ditunjang dengan optimalisasi pada seluruh sumber daya yang dimiliki. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing dengan membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara merupakan salah satu misi RPJPN 200-2025.

DPR-RI sebagai lembaga legislatif harus dapat mendorong kebijakan afirmatif bagi peningkatan kualitas belanja, khususnya kepada pemerintah daerah. Pengeluaran kebijakan bagi peningkatan kualitas belanja menjadi penting, sehingga tidak akan terjadi isu-isu bahwa belanja daerah baru akan benar-benar terlaksana atau terserap pada akhir-akhir tahun fiskal saja, bahwa belanja daerah selalu tidak tepat sasaran, dan sebagainya. Meningkatnya kualitas belanja (khususnya belanja modal) pemerintah daerah dapat meningkatkan potensi dan daya saing daerah. Peningkatan potensi dan daya saing daerah pada akhirnya dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pembangunan yang berhasil di setiap daerah, pada akhirnya dapat mewujudkan daya saing dan kemandirian bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Editor

Jakarta, 28 Oktober 2022

Prof. Muhammad Zilal Hamzah, PhD

*The essence of competitiveness is liberated when we make people believe that what they think and do is important - and then get out of their way while they do it.*

Jack Welch

*If you don't have a competitive advantage, don't compete.*

Jack Welch



## INDEKS

- A  
anggaran v, xi, 3, 14, 15, 16, 18, 19, 21,  
25, 77, 79, 80, 81, 90, 95  
APBD viii, xiv, 13, 19, 69, 73, 74, 75,  
77, 79, 80, 81  
APBN 14, 15, 19  
ASEAN ix, xi, 3, 32, 37, 51, 53, 54, 55,  
56, 58, 59, 60, 116  
Association of Southeast Asian  
Nations 51
- B  
bahan baku 50, 56  
barang jadi 47  
barang penolong 50  
barang setengah jadi 47  
belanja daerah vi  
berkelanjutan 2, 5, 18, 23, 25, 26, 46,  
65, 84, 97, 98  
BRIN xiii, 29, 65, 66, 82, 92
- C  
Comparative Advantage viii, xiv, 45  
competitiveness 23, 26, 45, 107  
Covid-19 v, vii, xii, xiv, 15, 18, 43, 44,  
45, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,  
57, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 83, 86,  
90, 95, 103, 116
- D  
Daerah vii, viii, xii, xiv, 12, 13, 15, 20,  
25, 27, 28, 65, 66, 67, 69, 74, 75,  
76, 81, 82, 85, 86, 87, 89, 90, 91,  
92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101,  
115, 116, 117  
daya saing v, vi, ix, x, xi, xii, xiii, 1, 2,  
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 18, 19, 23,  
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36,  
39, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 55, 59,  
60, 62, 65, 66, 67, 69, 73, 74, 75,  
76, 77, 80, 81, 83, 85, 92, 93, 96,  
98, 104, 106  
daya saing global ix, 3, 6  
defisit 44, 48, 49  
domestic value-added 47  
DVA 47, 51, 53, 56, 59
- E  
Efisiensi 8, 10, 30, 76, 82, 93, 105  
ekonomi ii
- F  
foreign value-added 47  
FVA 47
- G  
GCI ix, 3, 6, 28
- I  
IDSD 29, 66, 82  
IMD ix, x, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 103  
impor 44, 48, 50, 56, 64, 70, 94, 96  
Indeks Spesialisasi Perdagangan 46  
Indonesia i, iii, iv, v, vi, vii, ix, x, xi, xii,  
xiii, xiv, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14,  
15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25,  
27, 28, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39,  
40, 41, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 53,  
54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63,  
64, 79, 80, 83, 86, 89, 95, 96, 101,  
104, 105, 106, 112, 114, 116, 117

- industri manufaktur teknologi menengah dan tinggi 47, 51, 55, 56, 57, 62
- industri manufaktur teknologi rendah 46, 51, 53, 54, 55, 62
- Infrastruktur vii, xiv, 1, 2, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 92, 93, 104, 105
- Inovasi 10, 66, 82, 93, 94
- integrasi 39
- internasional ix, 5, 7, 25, 38, 39, 40, 46, 66, 98, 99, 100, 104, 106
- Investasi 11, 19, 76, 78, 82, 104, 115
- IPM 37, 38
- J
- jasa bisnis 47, 51, 60, 62
- jasa publik dan individu 47, 51, 59, 60, 62
- K
- kebijakan v, ix, x, xii, 4, 6, 13, 16, 25, 28, 39, 43, 50, 52, 62, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 87, 98, 99, 104, 105, 106, 116
- ketidakpastian global 56, 62
- Keuangan 3, 14, 15, 16, 20, 29, 30, 68, 72, 73, 85, 92, 93, 95, 104, 105, 112, 114, 115, 116
- keunggulan komparatif 10, 45, 46, 104
- komoditas 45, 46, 47, 48, 52, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63
- kompetitif x, 1, 6, 24, 27, 39, 47
- L
- lockdown xii, 43, 50, 52, 62
- Lukman Hakim. عجار ; عجار
- M
- masyarakat vi
- merchandise 60, 61, 62, 63
- Metode 6, 46, 48, 63, 69, 81
- N
- Neraca perdagangan 48
- Neraca Perdagangan Indonesia 44, 49, 64
- net exports 48
- nilai tambah domestik 47, 53, 55
- NPI 44, 48
- P
- pandemi xii, 15, 18, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 83, 86, 90, 95, 96, 103
- pasar 1, 5, 6, 10, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 61, 75, 94, 96
- pelatihan 28, 34, 35
- pembangunan v, x, xi, xii, xiii, 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 36, 37, 38, 39, 65, 73, 74, 80, 81, 83, 84, 86, 91, 95, 97, 98, 100, 106
- Pembatasan Sosial Berskala Besar 60
- Pendapatan xi, 2, 3, 13, 15, 16, 20, 75, 90, 91, 98, 99, 100
- pendekatan 45, 46, 69
- Pendidikan vii, 8, 10, 28, 29, 31, 33, 34, 68, 72, 93, 94, 101, 104, 105, 106, 114, 116
- pengekspor 47
- perekonomian v, ix, x, xii, 1, 5, 7, 11, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 39, 40, 43, 44, 45, 65, 69, 71, 73, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 86, 92, 96, 97, 99, 104

Pertumbuhan 14, 21, 76, 82, 86, 94  
 pertumbuhan ekonomi xi, xii, xiii, 1,  
 2, 5, 6, 11, 12, 14, 18, 19, 23, 26,  
 27, 43, 45, 46, 67, 68, 69, 73, 74,  
 76, 85, 93, 94, 98  
 potensi xiii, 66, 69, 73, 76, 79, 80, 81,  
 84, 85, 86, 92, 93, 97, 99, 100, 106  
 produktivitas ix, xiii, 6, 12, 16, 25, 27,  
 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40,  
 66, 84  
 PSBB 60, 62  
 R  
 rantai pasokan 51  
 RAPBN xi, 3, 15, 16, 20  
 Rasio Akselerasi 46  
 RCA 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55,  
 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63  
 RCTA 46  
 Regional Competitiveness Index 10,  
 20  
 Revealed Comparative Advantage  
 viii, xiv, 45  
 Revealed Comparative Trade  
 Advantage 46  
 S  
 SDM vii, x, 16, 24, 25, 35, 36, 37, 39,  
 93, 97, 98, 106  
 sektor migas 48, 49  
 sektor non migas 48, 49  
 sektor primer 46, 51, 52, 53, 55, 61,  
 62, 63  
 sektor riil 50  
 SITC 47, 53, 55, 57, 60, 61, 62  
 Standard International Trade  
 Classification 47, 53  
 sumber daya x, 1, 5, 16, 18, 24, 27, 28,  
 29, 36, 40, 61, 63, 69, 74, 85, 89,  
 106  
 surplus 44, 48, 49, 70  
 T  
 tenaga kerja v, x, xi, 10, 12, 24, 25, 26,  
 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 39,  
 40, 92, 93, 104, 106  
 transfer 26, 39, 86, 89, 104  
 U  
 UMKM 88, 89, 94, 95, 96  
 UNCTAD 47, 62  
 United Nations Conference on Trade  
 and Development 47  
 W  
 WFH 53  
 World Competitiveness Ranking 13

## BIOGRAFI EDITOR



**Prof. Muhammad Zilal Hamzah, PhD.**, lahir di Padang, Sumatera Barat, 11 Juli 1964. Lulus PhD dalam bidang Ilmu Ekonomi dari Fakultas Ekonomi, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) tahun 2005 dan memperoleh gelar Profesor pada tahun tahun 2008, dengan kekhususan pada Ilmu Ekonomi dan Desentralisasi Fiskal. Saat ini menjadi

Ketua Konsentrasi S3 Ekonomi Kebijakan Publik dan Ketua Centre for Financial Inclusion (CFI) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti serta Penilai Luar Akademik untuk Profesor di Universiti Malaysia Terengganu. Selain menjadi promotor dan penguji luar di beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia, Malaysia serta Swinburne University di Australia, juga tercatat sebagai anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Anggota Khusus Bidang Zakat dan Wakaf Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Penasehat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Anggota Asesor OJK Bidang IKNB dan Presiden Alumni UKM Chapter Indonesia. Bidang keahlian lain adalah dalam sektor Kebijakan Keuangan Publik dan Ekonomi Islam. Dalam bidang penelitian, telah menulis sekitar 70 artikel ilmiah (baik individu maupun bersama) dan sebagian besar telah dipublikasikan dalam berbagai jurnal seperti: OIDA International Journal of Sustainable Development, AL-AWQAF, IMAR Journal, ICEESE, JEM UKM Malaysia, ITRev dan Review of Islamic Economics, UK. Menulis beberapa buku: Fiscal Decentralization and Economic Growth; The Introduction of Fiscal Decentralization; The Success Factor of Sustainable Development, dan Readings in Islamic Economics. Disamping

itu, juga tercatat sebagai mitra bestari di berbagai jurnal seperti: Journal of Sustainability Science and Management (JSSM) Universiti Malaysia Terengganu; Journal of Finance and Accounting (AAJFA), Inderscience Publishers; Jurnal Ekonomi Malaysia (JEM), ITRev dan Journal AIJIEF Universitas Airlangga.

## BIOGRAFI PENULIS



**Dr. Ari Mulianta Ginting, SE., M.SE.** adalah Analis Legislatif Ahli Madya. Pendidikan Sarjana Manajemen Keuangan diselesaikan di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2006. Magister Ilmu Ekonomi diperoleh dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2008 dengan kekhususan Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi Ilmu Ekonomi Moneter. Penulis pada tahun 2020 menyelesaikan Program Doktor Ilmu Ekonomi dengan Konsentrasi *Public Policy* di Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti. Bekerja di Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Madya Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan konsentrasi kepakaran Kebijakan Ekonomi pada Pusat Penelitian, Setjen DPR RI. Penulis juga menjadi dosen tidak tetap untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Magister Manajemen di Universitas Pelita Harapan (UPH), dan Dosen Pascasarjana Magister Ekonomi, di Universitas Trisakti. Penulis dapat dihubungi melalui alamat *e-mail*: [ari.ginting@dpr.go.id](mailto:ari.ginting@dpr.go.id).



**Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak., C.A.** Menyelesaikan studi Sarjana pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Pernah mengajar di beberapa perguruan tinggi. Sejak tahun 2009 bekerja di Sektetarian Jenderal DPR RI sebagai Peneliti dengan bidang kepakaran Ekonomi Publik

di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa topik penelitian yang pernah dilakukan diantaranya, Analisis Penyelenggaraan Pengelolaan Kekayaan Negara Sumber Daya Alam, Strategi Kebijakan Investasi pada Era Otonomi Daerah, serta Strategi Peningkatan Daya Saing Daerah dalam Mendukung Perekonomian Daerah. Karya tulis ilmiah penulis juga telah dipublikasikan di beberapa jurnal, *proceeding* dan dalam bentuk buku. Beberapa judul karya tulis tersebut diantaranya, *The Effect of Local Government Income on Community Welfare by Using Expenditures as Mediating Variable*, **Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Sustainable Development**, serta Investasi dan Sistem Pengelolaan Investasi Pemerintah. Sebagai bagian dari *supporting system* Dewan, penulis juga terlibat dalam beberapa kegiatan kedewanan seperti, Penyusunan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan kinerja pemerintah, serta lain-lain sebagainya. Penulis dapat dihubungi melalui email: [venti.satya@dpr.go.id](mailto:venti.satya@dpr.go.id).



**Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.**, lahir di Jakarta 10 September 1986, menyelesaikan studi S1 jurusan Statistika – Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran, dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana (S2) Jurusan Statistika Terapan – Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Alam, Universitas Padjadjaran. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Penelitian. Tahun 2011 penulis terlibat dalam penyusunan dan pembahasan RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, kemudian pada tahun 2015 penulis terlibat dalam penyusunan RUU tentang Minyak dan Gas. Penulis juga

menghasilkan beberapa karya tulis ilmiah tentang ekonomi dan kebijakan publik seperti: Perubahan Struktur Ekonomi Tenaga Kerja dan Analisis *Multidimensional Scaling* (MDS) Dalam Mengelompokkan Penyerapan Tenaga Kerja di Berbagai Provinsi (2014), Peningkatan Daya Saing Industri Indonesia Dalam Menghadapi ASEAN *China Free Trade Area* (2015), Peran Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Berkelanjutan (2015), dll. Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*: [3dm1r4.er@gmail.com](mailto:3dm1r4.er@gmail.com).



**Dr. Rasbin, S.TP., M.SE.**, menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) di Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor pada tahun 2005 dan Pendidikan Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2008. Gelar Doktor diraih penulis pada tahun 2020 di Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Saat ini, penulis menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Madya bidang kepakaran Ekonomi Perdagangan pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan baik jurnal, buku, ataupun bentuk lain antara lain: “*Real Exchange Rate Misalignments: The Case of The Indonesian Rupiah*” (2021), “*Real Exchange Rate Undervaluation and Indonesia’s Manufacturing Exports*” (2021), “Desain Keuangan Daerah Setelah Covid-19 di Indonesia: Risiko Fiskal Daerah Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19” (2021), dan “Telisik Daya Tahan Usaha dan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19: Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Indeks Daya Saing Provinsi Bali: Tinjauan dari Faktor Pasar” (2021). E-mail: [rasbin@dpr.go.id](mailto:rasbin@dpr.go.id).



**DEWI RESTU MANGESWURI** lahir di Klaten, 6 Mei 1982. Menyelesaikan studi Sarjana dan Magister di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta jurusan Akuntansi. Jabatan saat ini adalah Analis Legislatif Ahli Muda di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. KTI yang pernah dipublikasikan terkait kepakaran yaitu: Pilihan Kebijakan Peningkatan Pajak Dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Bandung (Buku Tim, 2021), Potensi, Perkembangan, Dan Strategi Wisata Halal Daerah: Kasus Daerah Mayoritas Nonmuslim di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali (Buku Tim, 2020), Upaya Mengatasi Praktik Kartel di Indonesia (Jurnal Kajian, 2019), Kesiapan Pemerintah Daerah Kota Bandung Jawa Barat dalam Memanfaatkan Teknologi Disruptif bagi Pengembangan Ekonomi Wilayah (Buku Tim, 2019), Kebijakan Pembiayaan Perumahan Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) (Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 2016). Tergabung dalam tim kerja penyusunan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional. Penulis dapat dihubungi di: [dewi.mangeswuri@dpr.go.id](mailto:dewi.mangeswuri@dpr.go.id).

Fenomena  
**Daya Saing**  
*Indonesia*  
**di Era Global**

pi



[publicabooks.ascasrya.or.id](http://publicabooks.ascasrya.or.id)  
[publicainstitute@gmail.com](mailto:publicainstitute@gmail.com)  
[publicainstitute\\_jakarta](https://www.instagram.com/publicainstitute_jakarta)  
Penerbit Publica Institute Jakarta

BUKU EKONOMI

ISBN 978-623-8232-00-0



9 786238 232000